

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah terpenuhinya hak pendidikan agar kehidupannya lebih bermartabat. Pemenuhan hak pendidikan merupakan kewajiban dari setiap negara untuk bisa menyediakan layanan pendidikan untuk masyarakatnya termasuk untuk disabilitas. Indonesia menjamin hak pendidikan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31, Undang-undang Pendidikan Nasional pasal 5 serta termuat dalam undang-undang no 19 tahun 2011 mengenai pengesahan *Convention on The Right of Persons with Disabilities* (CRPD).

Convention on The Right of Persons with Disabilities (2007, hlm.16) mengakui bahwa:

Pihak-pihak negara mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, pihak-pihak negara wajib menjamin system pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah.

Untuk memperkuat terjaminnya pemenuhan hak-hak pendidikan terhadap disabilitas maka disusun Undang-Undang No 8 tentang Disabilitas tahun 2016 Pasal 10 berisi tentang hak pendidikan bagi disabilitas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menyebutkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia adalah sebanyak 1,6 juta orang. Satu juta lebih anak berkebutuhan khusus belum memperoleh pendidikan yang penting bagi kehidupannya. Dari 30% anak berkebutuhan khusus sudah memperoleh pendidikan, hanya 18% diantaranya yang menerima pendidikan di sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. 514 kabupaten/kota di Indonesia terdapat 62 kabupaten/kota yang belum memiliki Sekolah Luar Biasa. 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah regular pelaksana Sekolah Inklusif berjumlah 299 ribu. Ketersediaan sekolah regular pelaksana Sekolah inklusif berjumlah 32 ribu (Biro komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Tingginya angka persentase anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan disebabkan oleh berbagai hal, baik itu berupa karena kondisi tertentu anak, namun juga karena pelayanan pendidikan yang sulit untuk disediakan atau dijangkau. Apakah itu anak-anak yang masuk ke dalam kategori kebutuhan khusus, atau karena tidak mendapatkan layanan pendidikan yang disebabkan berbagai kendala fisik, geografis, ekonomi dan social (Mujito, Harizal, Elfindri. 2012, hlm 4).

Indonesia masih terdapat daerah dalam kategori tertinggal sehingga Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015 hingga 2019 kedepan, dimana pertimbangan daerah tertinggal ini mengacu pada Pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal. Status daerah tertinggal berdasarkan kriteria: 1) Perekonomian masyarakat, 2) Sumber daya manusia, 3) Sarana dan prasarana, 4) Kemampuan keuangan daerah, 5) Aksesibilitas, 6) Karakteristik daerah/geografis.

Indonesia memiliki kabupaten yang masih tertinggal dalam pencapaian aspek kuantitatif dan kualitatif pembangunannya, salah satunya dalam aspek pendidikan. Berdasarkan data dari Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015 terdapat 122 daerah yang dinyatakan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal, selanjutnya Koordinasi Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah untuk daerah tertinggal, Kawasan Perbatasan, Kawasan strategis Nasional, dan kawasan rawan bencana tahun 2017, prioritas nasional dalam pembangunan daerah akan berfokus pada salah satunya peningkatan sumber daya manusia dan IPTEK. Salah satu daerah yang berada dalam kategori daerah tertinggal tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, di Sumatera Barat.

Pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak berkebutuhan, terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang masih terdapat daerah tertinggal, serta masih minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan maupun pemerataan SLB di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga perlu dirancang strategi yang perlu dibangun oleh pemerintah dalam mengupayakan penyetaraan pendidikan bagi seluruh anak. Strategi yang diambil sekaligus untuk dapat menjawab tantangan dalam

memenuhi EFA (Education for All) yaitu dengan merealisasikan ide bahwa pendidikan untuk semua cara yang paling efektif adalah dengan mengembangkan ideologi dan konsep pendidikan inklusif. Pendidikan Inklusif dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam dan dari pendidikan (Booth, 2002).

Pendidikan Inklusif memberikan ruang untuk terakomodasinya semua anak tanpa memperdulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, Bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak disabilitas, anak-anak berbakat (Children with gifted dan talented), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan Bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salamanca Statement, 1994, UNESCO, 2006).

Menurut Ainscow (2004, hlm.3) :

Inclusion is a process. That is to say, inclusion has be seen as a never-ending search to find better ways of responding to diversity. It is about learning how to live with difference, and, learning how to learn from difference. In this ways differences come to be seen more positively as a stimulus for fostering learning, among children and adults.

Teori dari Anscow dapat diartikan sebagai berikut:

Inklusi adalah sebuah proses. Dengan demikian, inklusi biasanya dianggap sebagai penelitian yang tidak pernah berakhir dalam merespon keberagaman. Inklusi adalah proses untuk belajar dengan keberagaman, belajar untuk menerima keberagaman. Dengan keberagaman tersebut menjadi hal positif untuk stimulus pembelajaran diantara anak-anak dan orang dewasa.

Stainback (dalam Sunardi, 2002) memberikan batasan pendidikan inklusif dalam konteks setting persekolahannya, yaitu sekolah yang menampung semua anak di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih daripada itu sekolah yang inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individu tepenuhi, lebih lanjut

menyiapkan pendidikan yang efektif pada semua siswa dan meningkatkan efisiensi ongkos dan biaya masuk sekolah (UNESCO, 1994).

Pengembangan sekolah inklusif dibutuhkan suatu sumber pengembangan sekolah, yaitu Indeks Inklusif sebagai pendekatan dasar untuk mengembangkan sekolah dan menempatkan nilai-nilai inklusifitas kedalam tindakan.

Menurut Booth & Ainscow (2002, hlm.1):

The Index is a resource to support school development of schools. It is a comprehensive document that can help everyone to find their own next steps in developing their setting. The materials are designed to build on the wealth of knowledge and experience that people have about their practice. The challenge and support the development of any school, however 'inclusive' it is thought to be currently.

Teori dari Booth & Ainscow dapat diartikan sebagai berikut:

Indeks inklusif adalah sumber daya untuk mendukung pengembangan sekolah. Indeks adalah dokumen komprehensif yang dapat membantu semua pihak untuk mengembangkan kondisi atau pemahaman mereka. Sumber materi yang ada di indeks dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman orang-orang mengenai praktik inklusi. Tantangan dan dukungan pengembangan sekolah inklusi berkembang baru-baru ini.

Indeks inklusif dapat membantu dalam menjadi dasar dalam penerapan pendidikan inklusif, yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan program, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan inklusif, Indeks inklusif dapat menunjukkan sejauh mana proses pembelajaran di kelas menunjukkan derajat inklusivitas (Sunanto, 2010; Haqq. 2016, hlm 3).

Kerangka kerja dalam penerapan indeks inklusif ini terdapat tiga dimensi yang menjadi dasar dalam pengamatan serta menjadi sasaran dalam pengembangannya di sekolah. Ketiga dimensi tersebut adalah, 1) Dimensi Budaya (Creating Inclusive Cultures) menciptakan komunitas yang saling menghargai dan sikap penerimaan terhadap keragaman. Menjalani kerjasama dengan berbagai pihak, sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk mendukung terciptanya nilai-nilai inklusif sehingga bisa melahirkan kebijakan yang akan berpengaruh terhadap praktek. 2) Dimensi

Kebijakan (Producing Inclusive Policy) Mengembangkan sekolah untuk semua dan mengorganisir keragaman untuk semua agar dapat berjalan dengan baik pendidikan inklusif di sekolah sehingga terciptalah perubahan yang jelas yang menciptakan kerangka kerja untuk implementasi pendidikan inklusif di sekolah. 3) Dimensi Praktik (*Evolving Inclusive Practices*) Memobilisasi sumber daya serta mengatur pembelajaran untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Pelajaran yang dikembangkan responsif terhadap anak, yang merupakan hasil dari kebijakan dan budaya inklusif yang sudah ada dan bekerja sama sekolah, orang tua dan masyarakat untuk bisa memobilisasi itu semua. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan pihak yang terlibat didalamnya akan saling berkolaborasi dalam mendukung terlaksananya pendidikan inklusif di sekolah reguler (Both&Ainscow, 2002, hlm7).

Hadirnya Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif merupakan bentuk aplikasi perwujudan kebijakan pendidikan dalam melakukan pemerataan sekolah inklusif di berbagai daerah, sehingga anak berkebutuhan khusus dimanapun mereka berada, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil dapat terakomodasi dengan layak dalam aspek pendidikannya, tanpa memandang segala perbedaan yang dimiliki. Pendidikan inklusif di Indonesia sudah lama digulirkan, namun banyak kendala dalam implementasi pendidikan di setiap sekolah, khususnya dalam tingkat dasar di daerah terpencil. “Kenyataan dilapangan penyelenggaraan pendidikan inklusif belum semuanya sesuai dengan pedoman penyelenggaraan, baik dari segi kondisi, siswa, kualifikasi guru, sarana-prasarana penunjang, dukungan orang tua, maupun dukungan dari pemerintah pusat atau daerah” (Pratiningrum,2010), melihat hasil penelitian tersebut perlunya dibuat program pengembangan pendidikan inklusif, khususnya untuk daerah terpencil, karena harus segera didorong untuk segera bisa menerapkan pendidikan inklusif sebagai sarana untuk pemberian pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus disana dengan menerapkan indeks inklusifitas dengan memaksimalkan 3 dimensi yang terdapat didalam indeks inklusif tersebut.

Banyaknya anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan akses pendidikan, terutama mereka yang berdomisili di pedesaan (Tsaputra. 2015) Kurangnya fasilitas untuk akses pendidikan ini dialami oleh daerah tertinggal.

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terletak sekitar 150 KM dipantai Sumatera Barat merupakan daerah dengan peringkat 76 dari 122 daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden No 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal. Terdapat empat pulau utama sebagai tempat penyebaran penduduk yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan dan dikelilingi oleh banyak pulau kecil serta sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Mata pencaharian utama penduduknya adalah pertanian, peternakan, dan nelayan. Kabupaten Kepulauan Mentawai dihuni oleh 85.295 (Badan Pusat Statistik 2015), serta jumlah disabilitas berjumlah 280 (Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2015). Penyebaran penduduk terbanyak mendiami di Kec. Sikakap dengan jumlah 9.947 jiwa, atau 35,72 km² (Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016).

Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pendidikan masih tertinggal dalam pencapaian kuantitatif akses pendidikan, jauh tertinggal dibandingkan 18 kota kabupaten lainnya yang ada di Prov. Sumatera Barat. Angka Partisipasi Murni (APM) dari tingkat sekolah dasar 96 % (Susenas, 2015). Data ini masih secara umum, belum terdapat kondisi untuk anak berkebutuhan khusus baik angka partisipasi sekolah anak berkebutuhan khusus, maupun jumlah anak berkebutuhan khusus dalam usia sekolah secara resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara kualitatif, Kab. Kep. Mentawai masih tertinggal, baik fasilitas sarana dan prasana maupun dalam pendataan anak usia sekolah.

Hal menarik ditemukan dari kondisi ini adalah bahwa daerah tersebut dikenal dengan *call for urgent attention* yang bercirikan kepulauan, tertinggal dan infrastruktur jauh dari yang diharapkan. Sehingga data statistik pencapaian tersebut tidak begitu menyediakan informasi kondisi pendidikan daerah yang bersangkutan, salah satunya tentang pendidikan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. (Mujito, Harizal, Elfindri. 2012, hlm 14).

Melihat secara langsung bagaimana kondisi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya untuk bisa melihat nilai-nilai inklusifitas yang dimiliki berdasarkan 3 dimensi index inklusif maka dilakukan pengamatan secara langsung untuk studi pendahuluan. Kepulauan Mentawai yang cukup luas dan terdiri dari

beberapa pulau, maka pengamatan ini di fokuskan kepada daerah yang penyebaran penduduknya terpadat yaitu di Kecamatan Sikakap yang memiliki tiga desa, yaitu Takako, Sikakap, dan Metobe. Pemilihan Kec. Sikakap karena berdasarkan Informasi yang dihimpun dengan berkoordinasi dengan salah satu Non Orgasasion Governen (NGO) yaitu *Center For Disaster Risk Management and Community Development Studies* (CDRM&CDS) yang bergerak di bidang social untuk meningkatkan kemandirian bagi sumber daya local yang focus wilayah kerja mereka di Kecamatan yang terdapat di kepulau Pagai Utara dan Selatan, Kepulauan Mentawai.

CDRM&CDS telah melakukan pendataan terhadap anak berkebutuhan khusus yang ada di Kec yang ada di Kepulauan Pagai Utara dan Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari CDRM&CDS tahun 2017, jumlah disabilitas yang ada di Kec. Sikakap adalah 57 orang, dengan usia sekolah 15 orang. Informasi awal yang kami peroleh, anak berkebutuhan khusus disini sekarang sudah bersekolah. Dari 13 jumlah sekolah dasar yang ada di Kec. Sikakap, sembilan sekolah dasar sudah menerima anak berkebutuhan khusus, bahkan ada satu anak sekarang sudah melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama. Untuk keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) belum ada di daerah Kec. Sikakap. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai baru terdapat 2 SLB, yang itu berada di pulau lain yang jarak tembuhnya cukup jauh sampai 12 jam naik kapal. Untuk sekolah dasar di Kecamatan Sikakap tidak ada mendeklarasikan untuk menjadi pendidikan inklusif, maupun ditunjuk dari dinas pendidikan untuk menjadi sekolah piloting sekolah inklusi. Penerimaan anak berkebutuhan khusus semuanya hasil koordinasi orang tua, masyarakat dengan pihak sekolah serta dibantu dimediator oleh CDRM&CDS.

Sebagai data pendukung untuk mengetahui kondisi implementasi perkembangan pendidikan inklusif di daerah tertinggal Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya di Kec. Sikakap, karena terdapat sekolah yang Sudah menerima anak berkebutuhan khusus, maka peneliti melakukan eksplorasi pada 4 sekolah dasar yang menerima anak berkebutuhan khusus di lokasi penelitian itu. Hal ini dilakukan untuk menggali data-data factual untuk mendapatkan nilai-nilai inkluisifitas di sekolah dasar di Kec. Sikakap, dengan mengamati kebijakan yang ada, budaya serta praktik pembelajaran di

sekolah. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak sekolah, orang tua, kepala dinas pendidikan. Gambaran informasi yang diperoleh peneliti menemukan kondisi yang dialami dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah dasar serta nilai-nilai inklusifitas yang terkandung didalamnya, diantaranya: (1) Dimensi budaya yang teramati masyarakat masih memegang teguh nilai adat istiadat, yaitu adat Mentawai. Ada sebuah semboyan, “Surak Sabeu” yang artinya kita bersaudara. Untuk masyarakat Mentawai sendiri sudah ada sebahagian yang mulai terbuka dengan kemajuan zaman dan mulai memandang pentingnya pendidikan. Sedangkan sebahagian masih tertutup dengan perkembangan peradaban. Di Pulau Sikakap sudah banyak pendatang yang berdomisili disana, baik dari suku Nias, Minangkabau, serta batak namun mereka tetap mengikuti bagaimana aturan adat yang berlaku disana. Untuk agama terdapat islam, Kristen, serta agama kepercayaan. Terlepas dari itu, tampaknya kultur yang sudah heterogen ini memberikan sumbangsih mereka terhadap mulai memandang perbedaan sebagai hal yang positif sehingga masyarakat bisa hidup berdamai. Potensi terjadinya anak berkebutuhan khusus memang cukup tinggi disini. Masih minimnya pembangunan sarana dan prasarana publik sehingga menjadi daerah kategori tertinggal membuat banyak anak yang mengalami hambatan dalam belajar yang disebabkan oleh lingkungan dimana rendahnya mutu pendidikan serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu ancaman bencana alam yang cukup tinggi membuat iklim yang kurang kondusif dalam perkembangan pendidikan. Kondisi ini juga memberikan sumbangsih terhadap budaya disekolah, yang mulai menghargai keragaman setiap peserta didik. Sikap saling menghargai ini yang menjadi dasar bagi sekolah untuk bisa menerima anak. Mulainya anak berkebutuhan khusus bisa bersekolah di sekolah dasar karena adanya audiensi yang dilakukan orang tua yang difasilitasi oleh cdrm&cdr terhadap pihak sekolah. Di sekolah keberadaan Anak berkebutuhan khusus belum dapat diterima sepenuhnya dalam pembelajaran Bersama anak lainnya, karena keberadaan ABK mengundang perhatian teman-temannya sehingga kelas menjadi kurang kondusif, ditambah dari guru belum terlalu siap dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus di dalam kelas karena menganggap tidak berpengalaman dalam menanganinya. Dinas

pendidikan mempersilahkan ada anak berkebutuhan khusus untuk diterima disekolah, tapi untuk bagaimana praktiknya diserahkan kesekolah. Untuk lingkungan masyarakat ABK masih terdapat respon negative, dimana masih dianggap sebagai aib sehingga anak masih dikurung dirumah, untuk pendidikan menganggap anak tidak bisa apa, dan sikap yang ditunjukkan masih sebagai belas kasihan karena dianggap orang lemah karena kondisi yang dialami. Belum terbentuknya komunikasi yang baik antara pemerintah, melalui dinas pendidikan, sekolah, dan orang tua serta masyarakat tentang dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. (2) Dalam tataran kebijakan, masih belum terdapat regulasi yuridis yang jelas di tingkat daerah Kabupaten yang mengatur tentang layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Padahal Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Perda No 2 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas yang didalamnya telah mengatur tentang pendidikan inklusif. Namun hal ini belum tersosialisasi dengan baik ditingkat daerah Kab Kep Mentawai, sehingga masih minimnya pemahaman mereka akan pentingnya kebijakan akan pendidikan inklusif untuk memberikan hak pendidikan untuk semua anak. Dalam tataran Dinas Pendidikan juga belum menyentuh secara serius akan pendidikan inklusif ini. Belum ada kebijakan strategis yang dirancang. Namun terlepas dari itu, didapatkan informasi tentang terdapatnya Sembilan sekolah dasar di Pulau Sikakap yang telah menerima anak berkebutuhan khusus memberikan asumsi kebijakan ditingkat sekolah sudah mulai tampak. Sehingga ini telah menunjukkan sudah ada indikasi potensi nilai – nilai inklusif disana. Kebijakan di sekolah itu masih stagnan, sebatas mau menerima anak berkebutuhan khusus, namun dalam pelaksanaan hariannya, selalu berkuat dengan persoalan teknis seperti ketersediaan sarana/prasana, kebijakan kepala sekolah, keterbatasan pengetahuan guru, estimasi anggaran pembiayaan, dan bagaimana praktik serta penilaiannya buat anak. Harusnya sekolah sudah merancang dan memiliki kebijakan strategis disekolah sehingga bisa sebagai role untuk praktik. (3) Dalam dimensi Praktik pembelajaran di sekolah, Anak Berkebutuhan Khusus bersama- sama dengan anak normal ditempatkan dalam satu kelas, dengan guru, kurikulum dan pengelolaan yang sama dengan anak pada umumnya di sekolah tersebut. Layanan pendidikan khusus masih belum tampak disini, dimana belum

adanya proses asesmen serta modifikasi kurikulum terhadap kemampuan, potensi, serta hambatan anak. Hal ini menyebabkan beberapa anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar mengajar dan membuat mereka ketinggalan dalam pencapaian yang diharapkan. Ketersediaan aksesibilitas serta fasilitas juga masih kurang. Belum terciptanya suasana belajar-mengajar yang mendukung serta responsible terhadap kondisi anak. Walaupun begitu keaktifan anak berkebutuhan khusus untuk bisa selalu hadir dalam sekolah cukup tinggi dan bisa mengikuti proses belajar-mengajar walaupun mengalami hambatan dalam beberapa pembelajaran. Untuk membantu anak dalam belajar, guru menyiapkan waktu khusus setelah pulang sekolah untuk mengulang pembelajaran kepada anak.

Implementasi pendidikan inklusif yang sudah berjalan, walaupun masih banyak tantangan yang harus dihadapi apalagi untuk daerah tertinggal dengan minimnya fasilitas tapi bukan hambatan untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif yang ideal sesuai harapan. Walaupun belum ada deklarasi sekolah inklusi ataupun kebijakan di tingkat daerah tentang pelaksanaan sekolah inklusi, namun secara harfiah pendidikan inklusif telah diterapkan sehingga perlu didukung untuk bisa dimaksimalkan, terukur, terencana, dan sistematis. Terlebih belum adanya penelitian yang dilakukan selama ini tentang sejauh mana keterlaksanaan nilai-nilai inklusif yang ada disana, serta kompleksitas permasalahan karena daerah terpencil sehingga peneliti tertarik untuk melakukan analisis secara sistematis yang dituangkan dalam penelitian implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar di Kab. Kep. Mentawai sehingga bisa melahirkan program pengembangan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Kab. Kep. Mentawai.

1.2 Tujuan Penelitian

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merancang program pengembangan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar di Kab. Kep. Mentawai.

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun upaya untuk mencapai tujuan umum diatas, maka tujuan khusus yang akan di capai dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui kondisi factual pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar yang telah diberlangsung di Kab. Kep. Mentawai berdasarkan indeks inklusif.
- b. Mengetahui factor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah dasar Kec Sikakap Kab Kep Mentawai.
- c. Membuat rumusan rancangan program pengembangan pendidikan inklusif yang tepat untuk tingkat sekolah dasar di Kab Kep Mentawai.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana kondisi factual pelaksanaan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Kab Kep Mentawai berdasarkan indeks inklusif?
- 1.3.2 Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Kab Kep Mentawai?
- 1.3.3 Bagaimana program pengembangan pendidikan inklusif yang tepat untuk tingkat sekolah dasar di Kap Kep Mentawai?

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari penelitian ini adalah program pengembangan pendidikan inklusif untuk tingkat sekolah dasar di Kab. Kep Mentawai seingga bisa menjadi petunjuk teknis bagi implementator dan actor pelaksana pendidikan inklusif agar implementasian pendidikan inklusif di sekolah dasar memiliki pedoman pelaksanaan, dasar penyusunan program kerja, serta merumuskan teknis pelaksanaan pada jenjang sekolah dasar, serta untuk daerah terpencil lainnya bisa menjadikan contoh agar terwujudnya pemerataan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui implementasi pendidikan khusus serta diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sumber informasi dan rujukan dalam menjawab tantangan implementasi pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar yang ideal bagi Kab. Kep. Mentawai
- b. Bahan kajian untuk pengembangan pendidikan inklusif di daerah tertinggal. Sehingga bisa mengimplentasikan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar

serta dikembangkan pada tingkat selanjutnya sehingga pemerataan pendidikan bisa terlaksana dan anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan hak pendidikannya dimanapun dia tinggal.

1.4.2 Manfaat Praktik

a. Bagi Guru/Pendidik

Bahan rujukan yang memberikan pemahaman tentang pendidikan inklusif, sehingga bisa memiliki kesiapan dalam memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus, serta peningkatan kompetensi sebagai pendidik agar bisa merancang proses belajar mengajar yang menyenangkan, responsible terhadap semua anak, memahami keragaman karakteristik peserta didik, merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan anak, sehingga bisa mengajarkan nilai-nilai keinklufitan untuk terciptanya budaya inklusif di sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Pemerintah/Pemangku Kebijakan

Pemerintah sebagai *Stakeholders* dapat menjadikan bahan masukan untuk bisa merancang kebijakan serta regulasi yang sesuai untuk implementasi pendidikan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, sehingga pendidikan inklusif bisa dilaksanakan dan diterapkan dengan baik dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif, sehingga bisa terus diatasi setiap kendala-kendala yang dialami serta menjalin kerjasama dengan sekolah serta masyarakat agar terciptanya pendidikan inklusif yang ideal dan kondusif, serta sesuai dengan kondisi daerah.

c. Bagi Masyarakat

Informasi bagi masyarakat untuk bisa mengetahui tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, sehingga bisa ikut membantu dalam keterlaksanaan pendidikan inklusif dengan mendukung sekolah sekitar dan membudayakan sikap saling menghargai serta mendukung anak berkebutuhan khusus yang berada dalam lingkungan untuk bisa mendapatkan hak pendidikan.

d. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman dalam merancang program pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar bagi daerah tertinggal sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian yang lebih baik lagi dengan tema yang sama. Peneliti selanjutnya dapat menjadikan prosedur yang telah diterapkan dalam penelitian ini sebagai pedoman.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis ini memuat tentang gambaran isi dari setiap bab, urutan penulisan, serta keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab. Struktur organisasi tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Bab I menggambarkan uraian pendahuluan tentang temuan awal penelitian yang akan dilakukan. Bab I terdiri dari beberapa sub-bab, antara lain: latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.
- 1.5.2 Bab II berisikan tentang kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Hakikat pendidikan, Pendidikan Inklusif, Indeks Inklusif, penelitian relevan.
- 1.5.3 Bab III berisikan terkait metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian terdiri dari desain penelitian, partisipan penelitian, partisipan penelitian, pengumpulan data, analisis data dalam penelitian tesis ini.
- 1.5.4 Bab IV menjabarkan tentang hasil penemuan penelitian yang telah dilakukan. Bab ini akan membahas tentang hasil pengolahan dan analisis data yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.
- 1.5.5 Bab V menjabarkan tentang kesimpulan, implikasi serta saran yang akan diberikan terkait dengan diselesaikannya penelitian ini. Adapun sub-bab dari Bab V adalah kesimpulan dan rekomendasi.